

STRATEGI KEBIJAKAN TERINTEGRASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN TABALONG

DITUJUKAN KEPADA :

- | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1. Bupati Tabalong | 5. Dinas Pendidikan | 9. Pemerintah Desa | 13. Puskesmas |
| 2. Dinas Kesehatan | 6. Dinas Sosial | 10. TP PKK | 14. Dunia usaha (CSR) |
| 3. Dinas PUPR | 7. Bappeda | 11. BKKBN | 15. Perguruan Tinggi |
| 4. Dinas Ketahanan Pangan | 8. DPRD Kabupaten Tabalong | 12. Rumah Sakit | 16. Organisasi masyarakat |

TIM PENULIS :

Roli Yadi Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong dan
Gazali Rachman Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

RINGKASAN EKSEKUTIF



Tiga alternatif kebijakan yang dapat diterapkan adalah: (1) intervensi 1.000 HPK dengan fokus pada ibu hamil, bayi, dan balita; (2) edukasi gizi dan perubahan perilaku melalui kampanye hidup sehat, peningkatan literasi gizi keluarga dan penguatan kader Posyandu; serta (3) konvergensi lintas sektor yang mengintegrasikan program kesehatan, pendidikan, sanitasi, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial. Berdasarkan analisis Multi-Criteria Analysis (MCA), strategi paling efektif adalah konvergensi lintas sektor (skor tertinggi 4,60), dengan dukungan intervensi 1.000 HPK dan edukasi masyarakat.

Dengan penerapan kebijakan terintegrasi, Tabalong dapat menurunkan prevalensi stunting di bawah 20% dalam dua tahun ke depan. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak, tetapi juga memperkuat produktivitas tenaga kerja, menurunkan beban pembiayaan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pada akhirnya, strategi ini akan berkontribusi pada pencapaian visi Indonesia Zero Stunting 2045, sekaligus memastikan generasi Tabalong tumbuh sehat, cerdas, dan produktif.

PENDAHULUAN

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun (1.000 Hari Pertama Kehidupan/HPK). Dampaknya tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik, tetapi juga menurunkan perkembangan kognitif, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia. Di Kabupaten Tabalong, stunting masih menjadi isu strategis pembangunan. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, prevalensi stunting mencapai 23,1%, meningkat dari 18,1% pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanganan stunting masih memerlukan penguatan agar mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal pembangunan daerah.

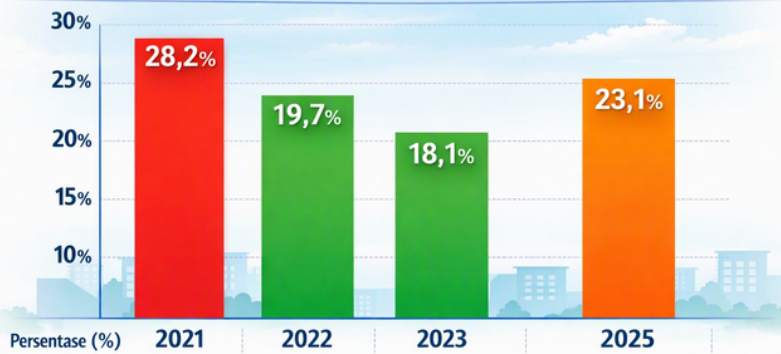
Pemerintah Kabupaten Tabalong telah menetapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025–2029, termasuk melalui percepatan penurunan prevalensi stunting. Kebijakan tersebut selaras dengan target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang menargetkan prevalensi stunting nasional turun menjadi 14,2% pada tahun 2029. Upaya percepatan penurunan stunting juga memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang mengamanatkan pelaksanaan percepatan penurunan stunting melalui pendekatan konvergensi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Tabalong telah melaksanakan berbagai program melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), penguatan Posyandu, intervensi gizi spesifik dan sensitif, serta kolaborasi dengan pemerintah desa dan berbagai pemangku kepentingan, peningkatan prevalensi stunting pada tahun 2024 menunjukkan bahwa penguatan kebijakan masih sangat diperlukan. Tantangan yang dihadapi meliputi belum optimalnya integrasi perencanaan dan penganggaran lintas perangkat daerah, belum meratanya kualitas intervensi hingga tingkat desa, pemanfaatan data keluarga berisiko stunting yang belum optimal sebagai dasar pengambilan keputusan, serta perlunya peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam pemenuhan gizi dan pola asuh anak. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang lebih terintegrasi, berbasis bukti (evidence-based policy), dan berorientasi pada hasil agar target penurunan stunting dalam RPJMD Kabupaten Tabalong maupun target nasional dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

DISKRIPSI MASALAH

Grafik Batang Stunting Tabalong SSGI 2021-2025

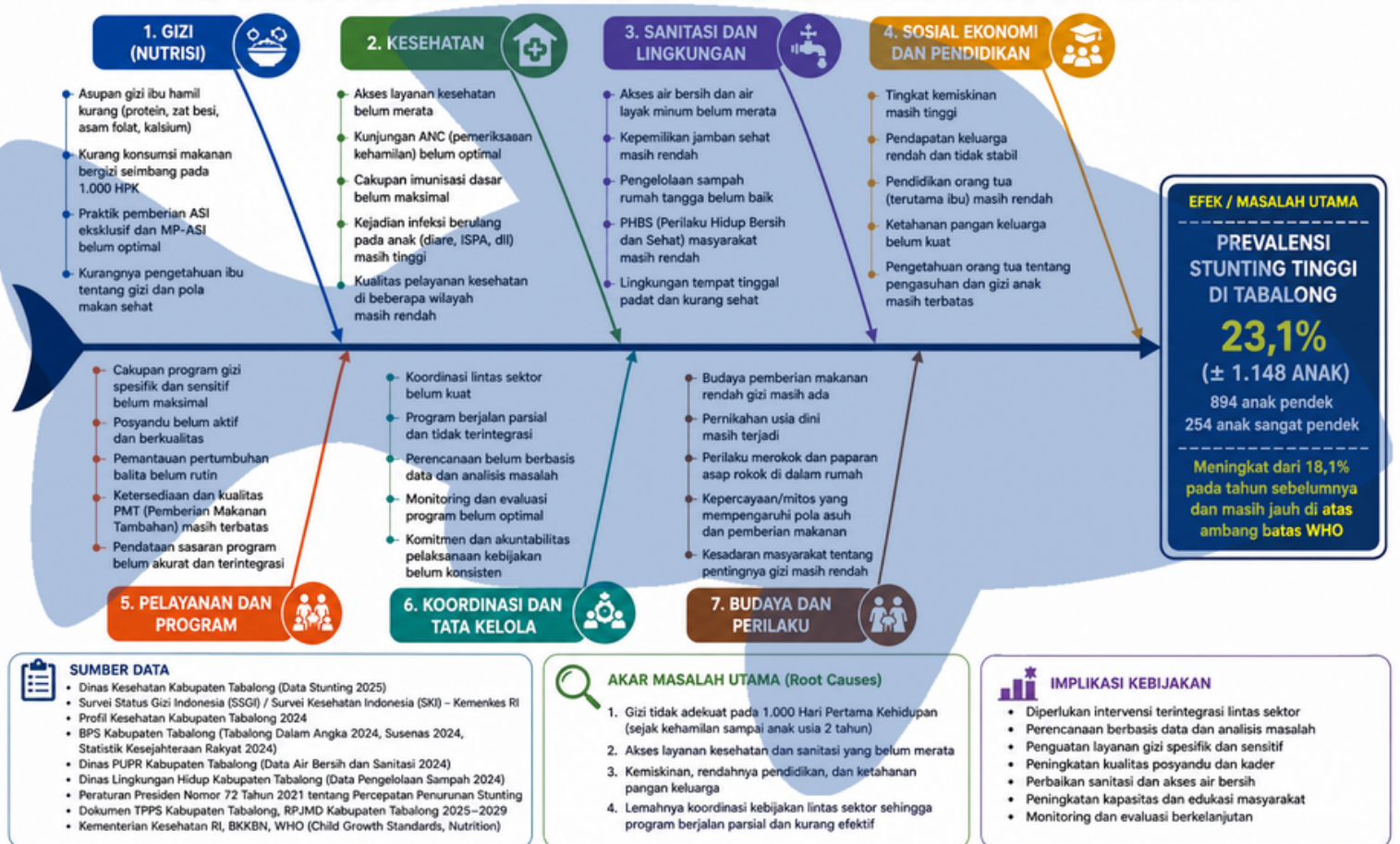
Prevalensi Stunting Kabupaten Tabalong (%)



Sumber: SSGI Kemenkes RI 2021-2025

Keterkaitan antar faktor menunjukkan bahwa gizi dan layanan kesehatan merupakan akar masalah paling dominan di Tabalong. Kekurangan gizi pada ibu hamil dan balita diperparah oleh akses layanan kesehatan yang tidak merata, sehingga deteksi dini dan intervensi gizi tidak berjalan efektif. Sanitasi buruk memperkuat risiko infeksi, sementara kemiskinan dan lemahnya tata kelola memperpanjang siklus stunting antar generasi. Evaluasi TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) juga menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi belum terjalin kuat, sehingga pelaksanaan program masih bersifat sektoral dan tidak terintegrasi.

FISHBONE DIAGRAM (ISHIKAWA) PENYEBAB TINGGINYA PREVALENSI STUNTING DI KABUPATEN TABALONG



Untuk menurunkan prevalensi stunting, Tabalong perlu memperkuat kebijakan berbasis bukti dengan pendekatan **konvergensi lintas sektor**. Fokus utama adalah peningkatan intervensi gizi pada 1.000 HPK, perluasan cakupan Posyandu dan Puskesmas, perbaikan sanitasi dan air bersih, serta penguatan data dan monitoring melalui TPPS. Pemerintah daerah juga perlu menggandeng dunia usaha melalui program CSR seperti *Orang Tua Asuh Anak Stunting* untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Dengan kebijakan terintegrasi dan kolaboratif, Tabalong diharapkan mampu menurunkan prevalensi stunting di bawah 20% dalam dua tahun ke depan dan berkontribusi pada visi **Indonesia Zero Stunting 2045**.

ALTERNATIF SOLUSI

Matriks Pembobotan Alternatif Kebijakan Stunting Tabalong

Alternatif 1 Intervensi 1.000 HPK	Alternatif 2 Edukasi Gizi & Perilaku	Alternatif 3 Konvergensi Lintas Sektor
Efektivitas 4 • Fokus Ibu & Balita	Efektivitas 3 • Bertahap & Perilaku	Efektivitas 5 • Tepadu & Menyeluruh
Efisiensi 3 • Butuh Biaya Besar	Efisiensi 5 • Biaya Rendah	Efisiensi 4 • Dukungan CSR
Kelayakan 4 • Tenaga Kesehatan	Kelayakan 4 • Mudah Diterapkan	Kelayakan 5 • Sesuai Regulasi
Keberlanjutan 3 • Bengentang Anggaran	Keberlanjutan 5 • Kesadaran Masyarakat	Keberlanjutan 5 • Kolaborasi Berkelanjutan
Dampak 4 • Signifikan Jangka Pendek	Dampak 4 • Jangka Panjang	Dampak 5 • Luas & Komprehensif
Skor 3.6 Cukup Efektif	Skor 4.2 Efisien & Berkelanjutan	Skor 4.8 Paling Unggul

Matriks Perbandingan Alternatif Kebijakan Penurunan Stunting Tabalong

Kriteria Penilaian	Alternatif 1 Intervensi 1.000 HPK	Alternatif 2 Edukasi Gizi & Perilaku	Alternatif 3 Konvergensi Lintas Sektor
Efektivitas	4	3	5
Efisiensi	3	5	4
Kelayakan	4	4	5
Keberlanjutan	3	5	5
Dampak	4	4	5
	Skor 3.6 Cukup Efektif	Skor 4.2 Efisien & Berkelanjutan	Skor 4.8 Paling Unggul

Alasan Skor 1–5 Kebijakan Stunting Tabalong

1–2	Rendah	Sulit Diterapkan & Tidak Efisien		
3	Sedang	Belum Optimal		
4	Baik	Efektif & Layak		
5	Sangat Baik	Komprehensif & Berkelanjutan		
Semakin Tinggi Skor, Semakin Baik Kebijakan!				
1–2	Rendah	3. Sedeng	4. Baik	5. Sangat Baik

Alternatif 3 – Konvergensi Lintas Sektor & Kolaborasi CSR

Mengintegrasikan program kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan ketahanan pangan dengan dukungan dunia usaha melalui program Orang Tua Asuh Anak Stunting. Skor total 4,8 menjadikannya rekomendasi utama. Pendekatan ini paling efektif dan berkelanjutan karena menyatukan semua faktor penyebab, sesuai dengan Perpres No. 72 Tahun 2021, serta berdampak luas pada aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.



Alternatif 1 – Intervensi 1.000 HPK

Fokus pada ibu hamil, bayi, dan balita melalui pemberian makanan tambahan bergizi, suplemen, serta peningkatan kunjungan Posyandu. Skor total 3,6 menunjukkan efektivitas tinggi dalam jangka pendek, tetapi efisiensi dan keberlanjutan masih terbatas karena bergantung pada anggaran dan tenaga kesehatan.

Alternatif 2 – Edukasi Gizi & Perubahan Perilaku

Menekankan kampanye gizi seimbang, pelatihan kader Posyandu, dan penyuluhan pola asuh anak. Skor total 4,2 menandakan efisiensi dan keberlanjutan yang baik, karena biaya rendah dan membangun kesadaran masyarakat. Namun, hasilnya bertahap dan tidak langsung menurunkan angka stunting secara cepat.



VISUALISASI KONVERGENSI LINTAS SEKTOR PENANGANAN STUNTING KABUPATEN TABALONG

Bersama Bergerak, Bersinergi, untuk Generasi Tabalong Bebas Stunting



Konvergensi Lintas Sektor dan Kolaborasi CSR

Kebijakan ini menjadi pilihan terbaik dengan skor tertinggi 4,8, karena mampu menyatukan seluruh faktor penyebab stunting secara terpadu. Pendekatan ini mengintegrasikan program kesehatan, pendidikan, sanitasi, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial dengan dukungan dunia usaha melalui program Orang Tua Asuh Anak Stunting.

Alasan Pemilihan:

Efektivitas: Menyasar akar masalah secara menyeluruh, tidak hanya aspek gizi tetapi juga sosial ekonomi dan lingkungan.

Efisiensi: Memanfaatkan sumber daya lintas instansi dan dukungan CSR, sehingga beban anggaran daerah lebih ringan.

Kelayakan: Sesuai dengan Perpres No. 72 Tahun 2021 dan kebijakan nasional penurunan stunting.

Keberlanjutan: Dapat berjalan jangka panjang karena berbasis kolaborasi dan sistem data terpadu.

Dampak: Memberikan efek luas terhadap kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan daerah.

Dengan penerapan kebijakan terintegrasi ini, Tabalong dapat menurunkan prevalensi stunting di bawah 20% dalam dua tahun, memperkuat ketahanan gizi keluarga, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Kebijakan ini juga akan memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha menuju visi Indonesia Zero Stunting 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. (2025). *Data Prevalensi Stunting Kabupaten Tabalong Tahun 2025*. Tabalong: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. Portal Satu Data Kabupaten Tabalong. (2025). *Data Stunting Kabupaten Tabalong*. Diakses dari <https://data.go.id>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting*. Jakarta: Kemenkes RI.
- World Health Organization (WHO). (2021). *Guideline on Child Growth and Nutrition*. Geneva: WHO.
- BPS Kabupaten Tabalong. (2024). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tabalong 2024*. Tabalong: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong.
- Dinas PUPR/DLH Kabupaten Tabalong. (2024). *Data Sanitasi dan Lingkungan Kabupaten Tabalong*. Tabalong: Dinas PUPR/DLH.
- BPS Kabupaten Tabalong. (2024). *Kabupaten Tabalong Dalam Angka 2024*. Tabalong: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong. (2024). *Statistik Daerah Kabupaten Tabalong 2024*. Tabalong: BPS Kabupaten Tabalong.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024*. Jakarta: BPS RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Data e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- BKKBN. (2022). *Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI)*. Jakarta: BKKBN.
- Pemerintah Kabupaten Tabalong. (2024). *Dokumen Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Tabalong*. Tabalong: Pemkab Tabalong.
- Peraturan Bupati Tabalong Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting.
- Pemerintah Kabupaten Tabalong. (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong 2024–2029*. Tabalong: Pemkab Tabalong.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia & BKKBN. (2024). *Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)/Survei Kesehatan Indonesia (SKI)*. Jakarta: Kemenkes RI.
- World Health Organization (WHO). (2023). *Social Determinants of Health: Conceptual Framework*. Geneva: WHO.
- <https://kalsel.antaranews.com/berita/500442/prevalensi-stunting-di-kabupaten-tabalong-naik-lima-persen>
- <https://tvtabalong.com/percepat-penanganan-anak-stunting-pemkab-tabalong-gandeng-dunia-usaha-jadi-orang-tua-asuh/>
- <https://tvtabalong.com/prevalensi-stunting-capai-231-persen-pemkab-tabalong-perkuat-sistem-pelaporan/>